



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

PERUBAHAN:

RENCANA AKSI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TAPIN



2024

JL. DATU NURAYA RT 01 KAWASAN RANTAU BARU



dukcapil.tapinkab.go.id



Disdukcapil Kabupaten Tapin



Dukcapil Kabupaten Tapin



disdukcapiltapin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Aksi Tahun 2024. Perubahan Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang dalamnya termuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen Perubahan Rencana Aksi ini disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Aksi Kinerja ini disusun, diharapkan bermanfaat dan dapat di realisasikan, agar pelayanan kependudukan lebih memuaskan bagi masyarakat kabupaten Tapin.

Rantau, Mei 2024
Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin,



Hj. Rina Indriani, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19820311 200501 2 017

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II RENCANA AKSI	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	6
2.2 Isu-Isu Penting Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	11
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Tapin	13
2.4 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	14
BAB III PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2024	14
Tabel 2.2 Rencana Aksi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	15
Tabel 2.3 Rencana Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2024	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan SOTK baru sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 6 September 2010 yang merupakan pemecahan Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pembangunan Kabupaten Tapin lima sampai sepuluh tahun kedepan adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tapin Yang Religius dan Sejahtera, yakni sebuah kabupaten yang kehidupan masyarakatnya selalu diwarnai dengan nilai-nilai agamis yang dipegang teguh dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dalam interaksi sosial sehari-hari.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, dan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah, maka dengan sendirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pembangunan Kabupaten Tapin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi dan misi Kabupaten Tapin seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk mencapai strategi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berlaku selama tiga tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD yang berlaku selama satu tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
35. Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
36. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Aksi Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Tujuan disusunnya Rencana Aksi adalah:

1. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2024 secara berkala;
2. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian Kinerja yang ditetapkan;
3. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
4. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan.

BAB II : Rencana Aksi

Menyajikan mengenai rencana aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin selama satu tahun anggaran.

BAB III : Penutup

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah – kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut. Pada bagian terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap.

BAB II RENCANA AKSI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan data dan dokumentasi kependudukan;
- c. Pemberian dokumen kependudukan dan pelayanan umum;
- d. Pengelolaan unit pelaksana teknis;
- e. Pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pendaftaran penduduk dan mutasi penduduk;
- c. Melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pencatatan sipil yang meliputi : kelahiran, kematian, pengangkatan, pengakuan, pengesahan serta perkawinan dan perceraian;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis kegiatan operasional SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) serta pengolahan data dan informasi kependudukan;
- e. Memberikan dokumen kependudukan dan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pembinaan UPT (Unit Pelaksana Teknis);
- g. Mengoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola ketatausahaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Ruang lingkup pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin kepada masyarakat, adalah sebagai berikut :

A. Dokumen Kependudukan:

1. Biodata Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. KTP el & KIA;
4. Surat Keterangan Pindah;
5. Surat Keterangan Pindah Datang;
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
9. Surat Keterangan Kelahiran;
10. Surat Keterangan Lahir Mati;
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
13. Surat Keterangan Kematian;
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
18. Akta Kelahiran;
19. Akta Kematian;
20. Akta Perkawinan;
21. Akta Perceraian;
22. Akta Pengakuan Anak;
23. Akta Pengesahan Anak.

B. Data Kependudukan:

- a. Data Perseorangan
- b. Data Agregat

Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Sekretariat

Mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan

menyelenggarakan urusan umum, aset, dan administrasi kepegawaian.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan asset Dinas;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan asset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan pendaftaran identitas penduduk, pindah datang, dan pendataan penduduk. Adapun bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;

- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan dan administrasi pendaftaran identitas penduduk;
- d. Penyusunan program, koordinasi pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pelayanan dan administrasi pindah datang penduduk;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan, dan administrasi pendataan penduduk;
- f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari :

- a. Seksi Identitas Penduduk
- b. Seksi Pindah datang dan Pendataan Penduduk

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan serta administrasi pencatatan sipil. Adapun Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pelayanan dan administrasi pencatatan sipil;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan administrasi kelahiran dan kematian penduduk;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan dan administrasi perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan kewarganegaraan penduduk;
- f. Penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi an pelaporan pelaksanaan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
- b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan informasi administrasi kependudukan,

pengolahan, dan penyajian data kependudukan. Adapun Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan informasi administrasi kependudukan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyajian data kependudukan, dan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan, yang terdiri dari :

- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Penyajian Kependudukan.

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Kerjasama dan inovasi pelayanan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Adapun Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan Kerjasama pengembangan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, Kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :

- a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

2.2 Isu-Isu Penting Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dapat dipetakan melalui kerangka logis analisis permasalahan secara berjenjang dari aspek dampak layanan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga, dan dukungan kelembagaan (sarana-prasarana, teknologi-informasi, SDM internal dan Sistem Operasional) untuk mendapatkan fungsi-fungsi manajemen yang paling kritis dalam mendongkrak kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk memudahkan pengembangan kebijakan strategis dan kebutuhan identifikasi kinerja sesuai struktur organisasi, analisis permasalahan harus diurai secara berjenjang sebagai tanggungjawab pejabat eselon II, III, IV dan seterusnya dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Permasalahan pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Masyarakat, sebagai bagian pemerintahan, yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan dan melaporkan peristiwa kependudukan;
2. Perangkat Daerah, sebagai pelaksana pemerintahan yakni masih rendahnya kesadaran perangkat daerah untuk pemanfaatan data kependudukan dalam rangka menunjang kinerja layanannya
2. Selain itu, perangkat teknis dan pendukung layanan adminduk yang dimiliki kurang memadai, kuantitas dan kualitas SDM yang belum optimal, serta komunikasi, informasi dan edukasi terkait layanan adminduk yang tidak efektif menyebabkan layanan adminduk kepada masyarakat belum optimal.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah **“Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat”**.

Memasuki era satu data, satu penduduk satu Nomor Identitas Penduduk (NIK), pelayanan administrasi kependudukan dapat dikatakan dasar dari segala pelayanan. Pemerintah Indonesia tengah menuju era satu data dengan NIK sebagai basisnya yang mana NIK akan menjadi sesuatu yang wajib apabila penduduk ingin mengakses pelayanan publik. Optimalisasi NIK dalam layanan publik akan semakin memudahkan masyarakat karena berbagai persyaratan yang saat ini diterapkan seperti fotokopi KTP-el untuk mendapatkan layanan publik menjadi tidak diperlukan lagi.

NIK dapat dilihat oleh penduduk diberbagai dokumen kependudukan, seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), maupun Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun. Disinilah yang menjadi peran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil untuk terus memberi imbauan kepada masyarakat agar tertib dalam administrasi kependudukan terutama tentang kepemilikan NIK tunggal.

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Dokumen Kependudukan dengan versi Digital mulai diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah tidak lagi menyediakan KTP-EI secara fisik karena untuk menekan biaya pengadaan blangko KTP-EI sehingga diganti dengan versi Digital. Pemerintah menargetkan 50 juta penduduk Indonesia telah berKTP- EI Digital.

Pola pikir yang masih berkembang di masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan itu sulit, lebih mudah dan praktis melalui calo, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mengurus dokumen kependudukan menjadi tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga harus kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan kependudukan. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan layanan administrasi kependudukan telah menjalankan berbagai inovasi. Inovasi ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan, bahkan saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah bekerja sama dengan berbagai mitra usaha, layanan Kesehatan dan instansi vertikal agar masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Dari berbagai inovasi yang telah dilaksanakan secara umum telah mampu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah kabupaten Tapin, namun masih ditemui berbagai permasalahan dilapangan. Adapun berbagai permasalahan tersebut seperti masih banyak masyarakat yang belum mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin seperti Inovasi Pelayanan Langsung diDatangi (PELANGI), Jemput Bola Perekaman Kesekolah-sekolah (JEBOL PELOSOK), Jemput bola perekaman ke desa-desa (JEMPOL PERKASA), dan sebagainya. Selain itu, jaringan internet yang tidak merata di Kabupaten Tapin menghambat proses pelayanan keliling. Perangkat teknis yang kurang mendukung juga menjadi penyebab belum optimalnya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena peralatan rekam ktp - el, laptop, dan lainnya harus bergantian dengan perangkat teknis yang digunakan di kantor pelayanan.

Sebagai unit pelayanan publik yang langsung berinteraksi dengan masyarakat umum profesionalisme SDM juga menjadi permasalahan. Kualitas dan Kuantitas SDM turut menjadi sorotan masyarakat karena masyarakat menginginkan pelayanan yang ramah, sopan dan santun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah menerima aduan masyarakat melalui Aplikasi SP4N LAPOR dan Google Review yang masih belum puas dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dapat dibagi kedalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait kewenangan Disdukcapil Tapin sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang diluar kewenangan Disdukcapil Tapin yaitu:

1. Faktor Internal
 - a. Pemahaman terhadap tugas, pokok, dan fungsi Disdukcapil;
 - b. Kuantitas dan Kualitas SDM Disdukcapil Tapin;
 - c. Profesionalisme SDM
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai standar Pelayanan Adminduk dan Pemanfaatan Data;
 - e. Ketersediaan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Adminduk;
 - f. Optimalisasi Penggunaan Anggaran;
 - g. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
2. Faktor Eksternal
 - a. Peraturan perundangan terkait Pelayanan Adminduk;
 - b. Kebijakan Kepala Daerah atau Pemerintah yang lebih tinggi terkait Pelayanan Adminduk;
 - c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan SP dan SOP Layanan Adminduk;

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Tapin

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Adapun Syarat Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator Kinerja yang Memadai untuk Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah

- a. *Spesific (S)* yaitu harus bersifat spesifik, detail dan terfokus;
- b. *Measurable (M)* yaitu dapat diukur;
- c. *Achievable (A)* yaitu target yang telah ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai, ada nilai atau hasil peningkatan;
- d. *Relevant (R)* yaitu target yang dipilih merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok;
- e. *Time (T)* yaitu waktu untuk mencapai target tersebut/deadline.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada Tahun 2024 adalah:

**Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2024**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Pemenuhan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-EL
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya Pemenuhan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan OPD dan Kecamatan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

2.4 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024

Penyusunan dan pelaksanaan perubahan rencana aksi kinerja tahun 2024 dikarenakan adanya penyesuaian pada pohon kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada Tahun 2024. Penyesuaian pada pohon kinerja mengakibatkan perubahan pada sasaran dan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Penyusunan rencana kinerja ini tidak terlepas dari peran dan arahan dari seluruh unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang berupa penetapan kegiatan-kegiatan dan jumlah output/penugasannya yang harus dilaksanakan. Adapun target kinerja tahun 2024 per triwulan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Aksi Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2024

Sebelum Perubahan:

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
	Meningkatnya Pemenuhan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-EL	%	99.55	99.51	99.53	99.54	99.55	Program Pendaftaran Penduduk	IKM terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90 poin	89.63 Poin	89.74 Poin	89.85 Poin	90 Poin	286.169.200
									Persentase Rata-Rata Peningkatan Masyarakat yang memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk	7.1%	3%	5.5%	6%	7.1%		
									Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	79.60	79.50	79.54	79.58	79.60	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemohon KTP yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	275.299.200
	Meningkatnya Pemenuhan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	60	59.75	59.80	59.90	60		Persentase Pemohon KIA yang Diselesaikan tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100								
		Persentase Kepemilikan	%	54.5	54.38	54.42	54.47	54.5	Peningkatan Pelayanan	Jumlah Laporan	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	275.299.200

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
		Akta Perkawinan							Pendaftaran Penduduk	Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan OPD dan Kecamatan	%	9.7	3	5	7	9.7	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemohon KTP yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	10.870.000
									Persentase Pemohon KIA yang Diselesaikan tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	78	77	77	78	78	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Aminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Aminduk terkait Pendaftaran Penduduk	42.696 Dokumen	10.674 Dokumen	21.348 Dokumen	32.022 Dokumen	42.696 Dokumen	10.870.000
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	41	10	20	35	41	Program Pencatatan Sipil	IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	90 poin	89.42 Poin	89.62 Poin	89.81 Poin	90 Poin	379.298.710
									Persentase Rata-Rata Peningkatan Masyarakat yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%		

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
										Persentase hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
									Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Masyarakat yang memiliki Akta Kelahiran	2%	2%	2%	2%	2%	379.298.710
										Persentase Peningkatan Masyarakat yang memiliki Akta Kematian	2%	0.5%	1%	1.5%	2%	
										Persentase Peningkatan Masyarakat yang Memiliki Akta Perkawinan	2%	0.5%	1%	1.5%	2%	
										Persentase hasil koordinasi dengan petugas desa Rukun Kematian yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
										100%	100%	100%	100%	100%		
								Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5.000 Dokumen	1.500 Dokumen	3.000 Dokumen	4.000 Dokumen	5.000 Dokumen	44.680.370	
								Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	243.102.110	
								Penyusunan Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	90.071.800	

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									disusun							
									Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data	92.60%	25%	50%	75%	92.60%	306.743.500
									Persentase Permohonan Hak Akses Pemanfaatan data yang Ditindaklanjuti	9.70%	0%	3.23%	6.47%	9.7%		
									Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Regulasi Daerah yang Ditetapkan sesuai dengan Amanat Peraturan Diatasnya	100%	25%	50%	75%	100%	125.233.500
									Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	125.233.500
									Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Regulasi Daerah yang Ditetapkan sesuai dengan Amanat Peraturan Diatasnya	100%	25%	50%	75%	100%	43.665.000
									Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	Jumlah Dokumen, Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	43.665.000

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Informasi Administrasi Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun						
									Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Data Kependudukan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	137.845.000
									Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 Laporan	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	137.845.000
									Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tingkat Akurasi Data	92.60%	25%	50%	75%	92.60%	57.652.400
									Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian data Kependudukan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	57.652.400
									Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	35.967.400
									Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.685.000
	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Poin	89.22	89.22	89.22	89.22	89.22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	25.53 (score)	25.53 (score)	25.53 (score)	25.53 (score)	25.53 (score)	8.014.662.911
									Nilai Komponen AKIP	21.65 (score)	21.65 (score)	21.65 (score)	21.65 (score)	21.65 (score)		

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									(Pengukuran Kinerja)							
									Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	12.05 (score)	12.05 (score)	12.05 (score)	12.05 (score)	12.05 (score)		
									Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	18.77 (score)	18.77 (score)	18.77 (score)	18.77 (score)	18.77 (score)		
									Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%		
									Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%	25%	50%	75%	100%		
									Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	85 poin	82 poin	83 poin	84 poin	85 poin		
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	25%	50%	75%	100%	29.741.256	
							Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti		100%	25%	50%	75%	100%			
							Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti		100%	25%	50%	75%	100%			
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	10.128.800	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar	7 Laporan	5 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	13 Laporan	29.062.700	

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja						
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	7.384.400
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	3.415.699.394
								Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan		100%	0%	50%	50%	100%		
									Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	21 orang/bulan	21 orang/bulan	21 orang/bulan	21 orang/bulan	21 orang/bulan	3.382.938.994
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	29.068.200

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.692.200
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas	100%	25%	50%	75%	100%	440.363.720	
									Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	100%	100%	100%	100%	100%		
								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	103.447.720	

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	15.805.000
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500 orang	50 orang	150 orang	350 orang	500 orang	321.111.000
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas	100%	25%	50%	75%	100%	2.300.831.200
									Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%		
									Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	100%	100%	100%	100%	100%		
									Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 paket	19.035.800
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 paket	538.565.500
									Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 paket	240.836.000

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 paket	123.292.400
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	50.179.500
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	1.328.922.000
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	542.032.640
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	401.596.900
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	140.435.740
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	999.245.897
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	476.523.397

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	11 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	11 Laporan	522.722.500
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	690.769.260
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 unit	97.447.050
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	45.489.210
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	547.833.000

Setelah Perubahan:

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
	Meningkatnya Pemenuhan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-EL	%	99.55	99.51	99.53	99.54	99.55	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang	100%	100%	100%	100%	100%	286.169.200

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									ditindaklanjuti							
									Persentase Hasil Koordinasi ke Desa/ Kelurahan untuk kegiatan sosialisasi yang ditindaklanjuti	100%	0	100%	100%	100%		
									Persentase Hasil Koordinasi dengan Desa/ Kelurahan untuk Pelayanan Keliling yang ditindaklanjuti	100%	0	100%	100%	100%		
									Persentase Hasil Koordinasi dengan pihak sekolah (SLTA Se-derajat) yang ditindaklanjuti	100%	0	100%	100%	100%		
									Persentase Hasil Koordinasi dengan pihak sekolah (PAUD/ TK/ SD/ SMP/ Sederajat) yang ditindaklanjuti	100%	0	100%	100%	100%		

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	82	79.50	80	81	82	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang bersertifikat	100%	0	100%	100%	100%	275.299.200
	Meningkatnya Pemenuhan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	60	59.75	59.80	59.90	60		Persentase Sarana Prasarana Teknis Layanan Pendaftaran Penduduk sesuai standar	100%	0	100%	100%	100%	
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100		Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk setelah adanya Sosialisasi melalui Post-Test	100%	0	100%	100%	100%	
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	55	54.38	54.5	54.75	55		Persentase permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk melalui pelayanan keliling yang diselesaikan tepat waktu	100%	0	100%	100%	100%	

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan OPD dan Kecamatan	%	100	3	50	75	100	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	275.299.200
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	78	77	77	78	78		Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pelayanan Pendaftaran Penduduk	40 Orang	0	0	0	40 Orang	
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	41	10	20	35	41		Jumlah narasumber sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	2 Orang	0	0	0	2 Orang	
										Jumlah materi sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4 Materi	0	0	0	4 Materi	
										Jumlah pelajar (SD, SMP, Sederajat) yang mengikuti sosialisasi	350 Orang	0	350 Orang	350 Orang	350 Orang	
										Jumlah narasumber sosialisasi KIA	1 Orang	0	1 Orang	1 Orang	1 Orang	
										Jumlah materi Sosialisasi KIA	1 Materi	0	1 Materi	1 Materi	1 Materi	
										Jumlah pelajar (SLTA Sederajat) yang mengikuti sosialisasi	350 Orang	0	0	350 Orang	350 Orang	
										Jumlah materi sosialisasi Perekaman KTP-EL	2 Materi	0	0	2 Materi	2 Materi	

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Jumlah narasumber sosialisasi perekaman KTP-EL	1 Orang	0	0	1 Orang	1 Orang		
									Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapatkan pelayanan keliling	36 Desa/ Kelurahan	0	20 Desa/ Kelurahan	30 Desa/ Kelurahan	36 Desa/ Kelurahan		
								Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelajar yang melakukan Perekaman KTP-el	100%	0	100%	100%	100%	10.870.000	
							Persentase SLTA se-derajat yang mendapatkan layanan jemput bola perekaman KTP-EL		100%	0	100%	100%	100%			
							Persentase Pelajar yang memiliki KIA		100%	0	100%	100%	100%			
							Persentase sekolah yang mendapatkan pelayanan KIA		100%	0	100%	100%	100%			
								Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Aminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Aminduk terkait Pendaftaran Penduduk	42.696 Dokumen	10.674 Dokumen	21.348 Dokumen	32.022 Dokumen	42.696 Dokumen	10.870.000	
									Persentase Permohonan KTP-El yang diselesaikan tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Persentase Permohonan KIA yang diselesaikan Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
									Data pelajar yang belum melakukan perekaman KTP-EL	350 Orang	0	150 Orang	250 Orang	350 Orang		
									Jumlah data pelajar yang belum memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	350 Orang	0	150 Orang	250 Orang	350 Orang		
								Program Pencatatan Sipil	Persentase hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	371.770.400	
								Persentase Hasil Koordinasi dengan Pemuka Agama dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan yang maha Esa yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			
								Persentase Hasil Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling yang ditindaklanjuti	100%	0	100%	100%	100%			

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
										100%	0	100%	100%	100%		
										100%	100%	100%	100%	100%		
								Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Petugas Pelayanan Pencatatan Sipil yang bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%		
									Persentase Sarana Prasarana Teknis Layanan Pencatatan Sipil sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	371.770.400	
									Persentase permohonan akta perkawinan melalui fasilitasi pencatatan perkawinan non muslim yang diselesaikan tepat waktu	100%	0	100%	100%	100%		

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Persentase Permohonan Akta kelahiran yang Diselesaikan tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
									Persentase Permohonan Akta Kematian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
									Persentase Permohonan Akta Perkawinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
									Persentase permohonan dokumen Pencatatan Sipil melalui pelayanan keliling yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
									Persentase permohonan akta kelahiran secara kolektif yang diselesaikan tepat waktu	100%	0	100%	100%	100%		
									Persentase permohonan akta kematian secara kolektif melalui Petugas Desa dan Rukun Kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%	0	100%	100%	100%		

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
										100%	0	100%	100%	100%		
								Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9.000 Dokumen	1.250 Dokumen	3.762 Dokumen	6.274 Dokumen	9.000 Dokumen	46.124.000	
									Jumlah data pasangan non muslim yang belum berakta perkawinan	466 Jiwa	0	673 Jiwa	570 Jiwa	466 Jiwa		
									Jumlah Data Penduduk yang Belum Berakta Kelahiran	78,000 Jiwa	0	78.547 Jiwa	78.274 Jiwa	78,000 Jiwa		
									Persentase Desa yang memberlakukan buku pokok pemakaman	100%	100%	100%	100%	100%		
								Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	235.573.800	
									Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan	36 Desa/ Kelurahan	0	25 Desa/ Kelurahan	36 Desa/ Kelurahan	36 Desa/ Kelurahan		

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									pelayanan Pencatatan Sipil melalui pelayanan keliling							
									Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan akta kelahiran secara kolektif melalui petugas desa	500 Jiwa	0	250 Jiwa	375 Jiwa	500 Jiwa		
									Jumlah ibu hamil, bayi, dan balita yang mendapatkan layanan akta kelahiran secara kolektif melalui Puskesmas	200 Jiwa	0	100 Jiwa	150 Jiwa	200 Jiwa		
								Penyusunan Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	90.071.800	
									Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pencatatan Sipil	50 Orang	0	0	0	50 Orang		
									Jumlah materi untuk sosialisasi pelayanan pencatatan sipil	1 Materi	0	0	0	1 Materi		

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
										Jumlah narasumber untuk sosialisasi pelayanan pencatatan sipil	1 Orang	0	0	0	1 Orang	
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data	92.6%	25%	50%	75%	92.6%	306.743.500	
							Persentase Hasil monitoring dan evaluasi data kependudukan yang ditindaklanjuti		100%	0	100%	100%	100%			
							Persentase Permohonan Hak Akses Pemanfaatan yang Ditindaklanjuti		100%	25%	50%	75%	100%			
							Hasil Koordinasi terkait pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti		100%	25%	50%	75%	100%			
								Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Regulasi Daerah yang Ditetapkan sesuai dengan Amanat Peraturan Diatasnya	100%	25%	50%	75%	100%	125.233.500	
								Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	125.233.500	

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Regulasi Daerah yang Ditetapkan sesuai dengan Amanat Peraturan Diatasnya	100%	25%	50%	75%	100%	43.665.000
									Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen, Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	43.665.000
								Jumlah OPD dan Kecamatan yang mengikuti sosialisasi Pemanfaatan data kependudukan		15 OPD dan Kecamatan	3 OPD dan Kecamatan	5 OPD dan Kecamatan	10 OPD dan Kecamatan	15 OPD dan Kecamatan		
									Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data penduduk yang diverifikasi/ validasi melalui Aplikasi LAMPID	100%	100%	100%	100%	100%	137.845.000
								Persentase Petugas Penyajian data yang bersertifikat		100%	100%	100%	100%	100%		
									Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	4 Laporan	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	137.845.000

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Kependudukan	Kependudukan						
									Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Hasil Koordinasi terkait Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	57.652.400
									Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Laporan Kependudukan yang Disajikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	57.652.400
									Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	35.967.400
									Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.685.000
	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Poin	89.22	89.22	89.22	89.22	89.22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	25.53 (score)	25.53 (score)	25.53 (score)	25.53 (score)	25.53 (score)	8.014.662.911
									Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	21.65 (score)	21.65 (score)	21.65 (score)	21.65 (score)	21.65 (score)		
									Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	12.05 (score)	12.05 (score)	12.05 (score)	12.05 (score)	12.05 (score)		
									Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	18.77 (score)	18.77 (score)	18.77 (score)	18.77 (score)	18.77 (score)		
									Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%		
									Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%	25%	50%	75%	100%		
									Indeks Kepuasan Pelayanan	85 poin	82 poin	83 poin	84 poin	85 poin		

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Sekretariat							
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	25%	50%	75%	100%	46.575.900
									Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%		
									Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%		
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	10.128.800
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7 Laporan	5 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	13 Laporan	29.062.700
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	7.384.400
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	3.814.168.307
									Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan	100%	0%	50%	50%	100%		

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan							
								Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	23 orang/bulan	21 orang/bulan	23 orang/bulan	23 orang/bulan	23 orang/bulan	3.781.407.907	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	29.068.200	
									Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.692.200	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas	100%	25%	50%	75%	100%	392.682.320	

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
										100%	100%	100%	100%	100%		
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	103.447.720
									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	15.805.000
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30 orang	0	30 orang	30 orang	30 orang	273.429.600
									Administrasi Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	2.299.805.600
									Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 paket	19.035.800

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 paket	526.860.300
									Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 paket	240.836.000
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 paket	123.292.400
									Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	50.179.500
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	1.339.568.000
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	465.872.240
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	385.436.500
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	80.435.740
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	974.045.897

No.	Sasaran kinerja	Indikator kinerja kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Per Triwulan				Program	Indikator Kinerja	Target	Target 2024 (TRIWULAN)				Anggaran
					1	2	3	4				1	2	3	4	
									yang baik							
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	476.523.397
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	497.522.500
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	520.569.260
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 unit	97.447.050
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	45.489.210
								Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan		0	100%	100%	100%	100%		
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	377.633.000

Rantau, Mei 2024
Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin,

Hj. Rina Indriani, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19820311 200501 2 017

Agar target rencana aksi kinerja dapat tercapai optimal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan beberapa kegiatan berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
Tahun 2024

No	Rencana Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan												Tempat	Penanggungjawab	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Jemput Bola Perekaman (KTP-EI) ke Desa-Desa (JEMPOL PERKASA)														Kelurahan/ Desa di Kab. Tapin	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Jemput Bola Perekaman (KTP-EI) ke sekolah-sekolah (JEBOL PELOSOK)														Sekolah di wilayah Kab. Tapin	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Pelayanan Langsung Didatangi														Desa di Kabupaten Tapin	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Langsung Cetak KIA ke Sekolah (PELITA SEKOLAH)														Sekolah (TK s.d SLTP) di Kabupaten Tapin	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Rapat Evaluasi dan Koordinasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk														Disdukcapil Tapin	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														Kab. Tapin	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil														Kab. Tapin	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Fasilitasi Pencatatan Perkawinan Non Muslim														Kab. Tapin	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Pendataan Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa														Kab. Tapin	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Identifikasi status sipil ibu hamil dan kelahiran														Puskesmas, Klinik Bersalin, Rumah Sakit di Kab. Tapin	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Peningkatan Cakupan Pencatatan Kematian														Desa di Kabupaten Tapin	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

No	Rencana Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan												Tempat	Penanggungjawab	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Video Inovasi Pelayanan														Kab. Tapin	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	Pembinaan Desa Admindak														Desa di Kab. Tapin	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	Rapat Kerjasama Pemanfaatan Data														Disdukcapil kab Tapin	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan														Disdukcapil kab Tapin	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	Pelayanan IKD Keliling														SKPD, Kecamatan, Karang Taruna, PKK	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Cetak Buku Agregat														Disdukcapil Tapin	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Cetak Buku Profil														Disdukcapil Tapin	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Maintenance Aplikasi Web, Server, dan Jaringan Lainnya														Disdukcapil Tapin	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Reward/ Punishment Pegawai														Disdukcapil Tapin	Sekretariat
	Forum Konsultasi Publik														Disdukcapil Tapin	Sekretariat
	Dukcapil Fair														Disdukcapil Tapin	Sekretariat

BAB III

PENUTUP

Perubahan Rencana Aksi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2024 disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Penyusunan dokumen ini melibatkan semua bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Diharapkan melalui penyusunan perubahan rencana aksi ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tapin.

Disusunnya perubahan rencana aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan rencana Aksi ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tahun Anggaran 2024.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.